



# Identitas Keindonesiaan dan Aktualisasi Pancasila bagi Generasi Milenial di Era Digital

Yudi Latif<sup>1</sup>

Kepala Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKPIP), anggota Asosiasi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI)

## ABSTRAK

*The conception of the nation-state rests with the subject of formative experience round up to the declaration of independence and its subsequent institution of governance. This experience is shaped by the best mind of the nation -in most account by their intelligentsia. In their youth, the generation of intelligentsia transform their situation into what can be ethically said about their statement in the world, since they are determined to change their society. Indonesia has a generation of intelligentsia who later became the founder of the nation and the framer of normative norm and common ground, Pancasila. Their youth informed us on the foundation and values of Indonesia. In the contemporary of Indonesia, the youth of diverse background has been searching for what their society stands for, much likes the generation of pre-independence Indonesia. Their role too still search for spaces and trajectory where they can espouse their lead and claim on the actualisation of Pancasila. Those, as it is turned out, would not be an easy one since the landscape of nationhood has various challenges waiting to be defined by them.*



## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Bagi Indonesia, tantangan global bukanlah hal baru, dan bukan juga yang terakhir. Postur geografis Indonesia tidak memungkinkan bagi Indonesia untuk menutup diri. Dengan banyaknya pulau serta berada dalam simpangan dunia, pengaruh dunia akan selalu mewarnai kehidupan Indonesia. Bahkan, Indonesia mengalami pematangan peradaban justru ketika mengolah ragam pengaruh dunia.

Dalam situasi ini, generasi milenial sebenar-benarnya adalah cerminan dari Indonesia itu sendiri. Sekaligus, mereka adalah cerminan respons Indonesia terhadap tantangan global. Generasi ini belajar lebih cepat, baik, dan buruk. Mereka juga melihat generasi terdahulu (*generasi "old"*) sebagai cermin mereka.

Khususnya dalam arus informasi, termasuk wujud asimetriknya, generasi ini selalu "*menggunakan cermin*", baik ragam respons terhadap tantangan maupun polah tingkah generasi "*old*".

Pada hemat penulis, dinamika ini perlu juga untuk dilihat dalam tahapan kebangsaan Indonesia. "*Kemudaan*" adalah bagian dari Indonesia. Pergerakan kebangsaan adalah "*kemudaan*". Pendiri bangsa kita adalah generasi muda, dengan segala kenafian mereka, dengan segala energi mereka untuk lepas dari belenggu kolonialisme. "*Kemudaan*" ini membawa hal-hal baru dalam peradaban di kepulauan nusantara, yaitu bangsa yang merdeka, Pancasila, konstitusi, republik. Mereka melihat generasi terdahulu waktu itu sebagai cermin mereka. Mereka menghargai yang baik, tapi jelas tidak mau terikat dengan pilihan-pilihan generasi terdahulu.

Dalam lapangan kebangsaan kita saat ini, “kemudaan” perlu dicermati kembali dalam terang pergerakan kebangsaan Indonesia yang membawa pada kemerdekaan Indonesia. Generasi muda saat ini sudah melihat tantangan, namun, mereka membutuhkan sebuah proses yang kreatif dan terus menerus. Bagaimana kita bisa sampai pada upaya-upaya tersebut?

Lapangan kebangsaan mengalami tantangan sebagaimana bangsa-bangsa lain di dunia, misalnya “*post-truth*” (dimana opini dan persuasi jauh lebih canggih dan penting daripada fakta), ketidakseimbangan global (termasuk akumulasi kekuatan pada aktor-aktor tertentu saja), otomatisasi (mengenai ketenagakerjaan dan jasa atas pilar ragam rupa mesin dan komputasi), migrasi (termasuk migrasi tenaga kerja rendah dan pengungsi), potensi kegagalan negara yang membesar (termasuk luntarnya relevansi batas-batas geografis negara), munculnya kripto-ekonomi, kerentanan keuangan global, dan munculnya aktor-aktor yang tidak mudah didefinisikan. Sekali lagi, menghadapi tantangan ini, lapangan kebangsaan tidak bisa direduksi hanya dengan membuat batas-batas baru dan memperkuat batas-batas yang lama, melainkan mengolah sebuah kemampuan dan ekosistem yang menghadirkan nilai-nilai keindonesiaan, dalam hal ini Pancasila.

Seberapa jauh generasi muda terlibat dalam lapangan kebangsaan ini? Akankah mereka kita jejal dengan beragam pengajaran? Jenis kemampuan seperti apa yang layak untuk dikembangkan? Bosankah mereka dengan situasi sekarang ?

## Pokok masalah

Kita dihadapkan pada tantangan bukan saja mengenai generasi muda itu sendiri melainkan terlebih dalam mengolah lapangan kebangsaan kita. Perihal ini tidak bisa hanya mengenai ketrampilan (*skill*) melainkan sebuah ekosistem kebangsaan (dan kenegaraan). Dimana generasi muda dalam proses pengembangan ekosistem itu?

## Tujuan

Diskursus mengenai kebangsaan adalah diskursus yang luas. Artikel ini tidak bermaksud untuk mengulas secara luas mengenai generasi muda dan keindonesiaan saat ini -secara generik. Artikel ini dimaksudkan sebagai proses perbandingan antara kemudaan dalam pergerakan kemerdekaan Indonesia dengan tantangan generasi muda saat ini. Dengan melihat perbandingan ini, ada beberapa informasi yang layak untuk kita timbang terus-menerus dalam mentransformasi lapangan kebangsaan dengan generasi muda sebagai bagian penting di dalamnya.

## Tinjauan pustaka

Hubungan antara “kemudaan” dan “pergerakan” dalam kehidupan suatu bangsa sudah banyak menjadi perhatian baik dari akademisi dan peneliti, maupun politisi dan penggiat media. Pertumbuhan sebuah bangsa turut diwarnai oleh keduanya. Pertumbuhan lapisan pergerakan di Indonesia juga memberikan petunjuk penting atas keduanya. Tokoh dan warna pergerakan selalu mengarah baik pada kemerdekaan dari “campur tangan asing”, maupun kehendak kuat untuk menggunakan cipta-rasa-karsa sepenuhnya untuk terwujudnya



bangsa yang bahagia dan berkontribusi pada peradaban dunia. Bukankah ini juga menjadi bagian dari lahir dan tumbuhnya sebuah kebangsaan.

Relevan menjadi bagian dari rujukan penulisan ini adalah karya “Inteligensia Muslim dan Kuasa : Genealogi Inteligensia Muslim Indonesia Abad ke-20” (Yudi Latif, Jakarta 2003: Mizan Pustaka). Karya ini mengulas peran kaum muda dari berbagai latar belakang dalam menggunakan ruang politik -sekecil apapun- untuk menggalang kehendak dan pergerakan untuk merdeka. Karya ini secara khusus memang melihat “titik unik” (*vantage point*) dalam hal “inteligensia muslim”. Namun, secara luas, lanskap pergerakan dibahas secara diakronis mengenai pergerakan yang kemudian melahirkan bangsa yang baru.

Karya lain yang relevan adalah “Negara Paripurna” (Yudi Latif, Jakarta 2011: Gramedia Pustaka Utama) dan “Mata Air Keteladanan (Yudi Latif, Jakarta 2014: Mizan Pustaka). Kedua karya ini mengulas Pancasila baik dalam kesejarahannya, visinya, maupun dalam wujud ketokohnya. Dalam kedua karya ini, “riwayat” nilai amat terkait dengan pengalaman dan visi yang hendak dinyatakan dan diperjuangkan. Lahirnya Bangsa Indonesia adalah pencapaian yang luar biasa dimana Pancasila menjadi suatu pemahaman dan kemudian pandangan hidup yang dipilih (secara kenegaraan, Pancasila dinyatakan sebagai ideologi dan dasar negara). Pencapaian ini dipandang penting karena dapat disejajarkan dengan kelahiran Cina Modern (May Fourth Movement 1919), Revolusi Amerika (1776), Jepang baik pada masa Tokugawa maupun pada peralihan Restorasi Meiji<sup>2</sup>. “Kemudaan” dihadirkan bukan hanya dalam umur

melainkan juga dalam hal upaya melihat dunia secara baru, ke depan, dan optimisme.

Tentu saja, banyak karya lain yang juga relevan dalam melihat hubungan antara kemudaan dan pergerakan. Termasuk dalam hal ini “Indonesia Kita” (Nurcholish Madjid, Jakarta 2004: Gramedia Pustaka Utama), naskah bersejarah (termasuk “Indonesia Menggugat”, pidato pembelaan Sukarno pada tahun 1930, dan “Indonesia Vrij” (Indonesia Merdeka) pidato pembelaan Mohammad Hatta pada tahun 1928. Khusus mengenai “Indonesia Kita”, Cak Nur (Nurcholish Madjid) memberikan gambaran bahwa pencapaian Indonesia sebagai bangsa perlu diikuti oleh kesadaran pada situasi bangsa.

Khususnya mengenai kajian terkini mengenai Pancasila, penulis hendak mengambil ulasan “Pancasila: antara Idealitas dan Realitas” (Yudi Latif 2017, pidato pada kuliah inaugurasi ALPI (Asosiasi Ilmu Pengetahuan Indonesia). Ulasan ini hendak memberikan konteks terkini dalam membudayakan Pancasila dalam kehidupan kebangsaan dan kenegaraan pada konteks terkini.

Lanskap karya-karya itu perlu dilihat tetap dalam konteks “kemudaan” dan “pergerakan”. Tetap dengan melihat pencapaian besar yaitu kelahiran Indonesia sebagai bangsa dan daya hidupnya sampai dengan sekarang, cara kita menimbang “kemudaan” dan “pergerakan” akan memberikan kesempatan bagi kita untuk melihat perihal identitas keindonesiaan dan aktualisasi Pancasila bagi generasi milenial di era digital.

Dalam konteks terkini, diperlukan kiranya rujukan yang relevan mengenai paparan (*exposure*) generasi muda dan media. Terutama dalam

bahasan ini, laporan-laporan diambil sebagai rujukan. Laporan tersebut, termasuk “Survei Nasional tentang Sikap Keberagamaan di Sekolah dan Universitas di Indonesia”, 2017, Jakarta: PIM (Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat), Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah dan “The State of the World’s Children 2017”, UNICEF (United Nations Children’s Fund).

## PEMBAHASAN

### Generasi Muda sebagai Inteligensia dalam Pergerakan Menuju Kebangsaan

Kaum muda dan pergerakan menjadi pembentuk kebangsaan Indonesia. Titik-titik pertumbuhan (*milestone*) kebangsaan Indonesia ini jelas didukung oleh “kemudaan” yaitu suatu ciri akan optimisme baru dan keyakinan akan perjuangan meski situasi kemasyarakatan tidak langsung menjadi bukti perjuangan mereka (*not self-evident*). Artinya, gagasan dan keyakinan itu tidak langsung mendapat bukti. Jika dunia kolonial zaman itu tidak memberikan insentif yang cukup bagi kaum muda, maka gagasan kebangsaan itu tentu bersifat utopis. Utopis ini dimengerti dalam jabaran Karl Mannheim. Dalam jabaran ini, “*utopia*” dimengerti sebagai sebuah proses olah pengetahuan yang (memang) dimaksudkan untuk mentransformasikan kini menuju masa depan. “Mentransformasikan kini” berarti harus ada perihwal yang terjadi pada masa kini yang perlu “diolah-bawa” ke masa depan. Pendeknya, gagasan tidaklah mungkin tanpa berpijak pada kenyataan pada kini.

Pada periode paruh pertama 1900, generasi muda Indonesia waktu itu

amat dipengaruhi oleh pendidikan dari hasil politik etis. Mereka mendapati pendidikan sebagai bagian penting dari emansipasi mereka. Pada saat yang sama, mereka melihat kejadian penting dunia di masa itu, misalnya “keberhasilan” Jepang dalam Perang Jepang-Rusia 1904 sebagai simbol Asia, Revolusi Xinhai 1911 di Cina yang menghasilkan Republik Cina dengan ideologi San-min Chu-i, serta munculnya Republik Turki pada tahun 1920 (diikuti kemudian dengan pengakuan hak memilih untuk perempuan), Restorasi Meiji yang melatari kemenangan Jepang dalam Perang Jepang-Russia 1904. Dalam situasi tersebut, generasi muda memahami bahwa kemerdekaan adalah rumusan masa depan mereka. Politik etis memang menyediakan pendidikan, namun warga Nusantara tidak boleh dan tidak mendapat legitimasi untuk mengambil keputusan sendiri. Kejadian dunia juga membuat generasi sadar bahwa harus ada rumusan masa depan (utopia) akan kenyataan yang disebut “kebangsaan”

Pilihan perjuangan melalui organisasi pergerakan ini juga menjadi bagian dari semangat zaman mereka. Mereka hidup dengan diliputi oleh Politik Etis yang menciptakan nomenklatur dan pranata pendidikan dalam dunia kolonial. Ada peningkatan penghargaan terhadap pendidikan. Hal ini diolah oleh generasi muda menjadi gerakan emansipasi itu sendiri. Beragam lembaga pendidikan muncul.

Organisasi banyak kemudian muncul dalam pergerakan kebangsaan. Mereka memperlengkapi upaya mereka dengan pendidikan. Organisasi itu termasuk Muhammadiyah (1912), Sarekat Islam (1912), Nahdlatul Ulama (1926), Algemeene Studie Club (1926).



Tabel 1: pribumi yang Mendaftar di Sekolah-Sekolah Rakyat dan Sekolah-Sekolah Bergaya Eropa pada 1900-1910

Tahun	Sekolah Rakyat	Sekolah Bergaya Eropa		Sekolah Kejuruan	TOTAL
		Sekolah Dasar	Sekolah Menengah		
1900	98.173	2.441	13	376	101.003
1910	303.868	5.108	50	1.470	310.496

Sumber: dimodifikasi dari Paul W. van der Veur (1969: 7, 11-11a)  
(diambil dari Yudi Latif 2003)

Kemudian lahir pula Indische Partij (1912) dan kemudian Partai Nasional Indonesia/PNI (1927).

Dari latar tersebut, generasi muda membangun sebuah ekosistem yang menjadi proses transformasi ke depan bagi bangsa yang kemudian diserukan sebagai Indonesia. Kongres Pemuda I (30 april - 2 Mei 1926) dan II (27-28 Oktober 1928) menjadi penanda kemudaan itu. Gagasan bahwa mereka adalah bangsa yang membenarkan (justification) terbentuknya suatu kenegaraan yang baru, yang melampaui ratusan tahun sejarah sebelumnya. (Bukankah ini bagian dari “kenaifan” kemudaan itu?). Indonesia menjadi pondasi deklaratif atas sebuah bangsa yang disebut Indonesia. Penyatu dari ekosistem ini ada dalam perihal kebangsaan, tanah air, dan bahasa persatuan. Jong (organisasi pemuda dengan berbagai latar primordial yang menjadi peserta dalam kedua Kongres Pemuda) yang menjadi asal primordial dan/atau komunitas epistemik tertentu memproyeksikan suatu ekosistem yaitu kebangsaan, tanah air, dan bahasa persatuan.

Dalam fase penting ini, generasi muda menganggap pendidikan sebagai bagian penting dari ekosistem kebangsaan itu. Dalam hal ini, mereka mengembangkan peran sejarah mereka sebagai inteligensia. Dalam rumusan Shils, inteligensia ini mentransformasikan latar dan proses pendidikan menjadi peran “penyeru”, “pemimpin”, “pelaksana” politik nasional (Shils, 1972). Sekaligus, dengan membangun ekosistem kebangsaan, mereka merumuskan peran mereka sebagai “bangsawan pikiran” (yang diidentifikasi pada kedalaman pengetahuan dan visi serta peran keunggulan sebagai penentu) dan bukan “bangsawan usul”<sup>3</sup> (yang diidentifikasi pada latar primordial sebagai penentu).

Pada periode berikutnya, organisasi sosial-politik mengalami perkembangan baik dalam jumlah, jangkauan, dan program. Kebangsaan Indonesia mulai dipahami sebagai pencapaian baru yang berbeda dari fase sejarah berikutnya -dengan refleksi atas Perang Jepang Rusia, Republik Cina dan Republik Turki. Kebangsaan ini diperjuangkan



sebagai suatu kemerdekaan, bangsa yang merdeka. Sebagai pondasi kemerdekaan ini, buah-buah penting dari pergerakan ditransformasikan menjadi cita kebangsaan dan kenegaraan.

*“Setiap bangsa harus memiliki suatu konsepsi (cita) mengenai hakikat yang paling dalam dari negara (cita negara/Staatsidee) serta konsepsi mengenai hakikat yang paling dalam dari tatanan hukum negara (cita hukum/Rechtsidee). Dalam pidatonya di Perserikatan Bangsa Bangsa, pada 30 September 1960, yang memperkenalkan Pancasila kepada dunia, Soekarno mengingatkan pentingnya konsepsi dan cita-cita bagi suatu bangsa: “Arus sejarah memperlihatkan dengan nyata bahwa semua bangsa memerlukan suatu konsepsi dan cita-cita. Jika mereka tak memilikinya atau jika konsepsi dan cita-cita itu menjadi kabur dan usang, maka bangsa itu adalah dalam bahaya” (Soekarno, 1989: 64). Senafas dengan itu, seorang cencekiawan Amerika Serikat, John Gardner, mengatakan, “Tidak ada bangsa yang dapat mencapai kebesaran jika bangsa itu tidak percaya kepada sesuatu, dan jika sesuatu yang dipercayainya itu tidak memiliki dimensi-dimensi moral guna menopang peradaban besar.”*

*(Yudi Latif, 2017)*

Dalam proses sejarah penting, terutama dari persidangan BPUK dan PPKI, lahir Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara dan sebagai pandangan hidup (weltanschauung). Kita melihat

kebaruan sekaligus keberlanjutan dari rumusan ini. Pancasila, secara keseluruhan, mencerminkan cita-cita emansipasi (lepas dari dunia lama) menuju kenyataan baru dimana “bangsa, tanah air, bahasa persatuan” menjadi pemersatu.

*“Secara historis kelima sila Pancasila merupakan perpaduan (sintesis) dari keragaman keyakinan, paham dan harapan yang berkembang di negeri ini. Sila pertama merupakan rumusan sintesis dari segala aliran agama dan kepercayaan. Sila kedua merupakan rumusan sintesis dari segala paham dan cita-cita sosial-kemanusiaan yang bersifat trans-nasional. Sila ketiga merupakan rumusan sintesis dari kebhinekaan (aspirasi-identitas) kesukuan ke dalam kesatuan bangsa. Sila keempat merupakan rumusan sintesis dari segala paham mengenai kedaulatan. Sila kelima merupakan rumusan sintesis daripada segala paham keadilan sosial-ekonomi.... “*

*“....[P]ancasila sebagai ideologi dipandang oleh Bung Karno dan pendiri bangsa lainnya lebih memenuhi kebutuhan manusia dan lebih menyelamatkan manusia daripada Declaration of Independence-nya Amerika Serikat atau Manifesto Komunis. Declaration of Independence tidak mengandung Keadilan Sosial; adapun Manifesto Komunis tidak mengandung Ketuhanan Yang Maha Esa (“harus disublimir dengan Ketuhanan Yang Maha Esa”) agar tidak terpejara dalam berhala materialisme. Oleh karena itu, Bung Karno menyebut*



*Pancasila sebagai hogere optrekking (peningkatan) daripada Declaration of Independence dan Manifesto Komunis....*

*[P]ancasila sebagai ideologi sesungguhnya telah memiliki landasan keyakinan normatif dan preskriptif yang jelas dan visioner. Pokok-pokok moralitas dan haluan kebangsaan-kenegaraan menurut alam Pancasila dapat dilukiskan sebagai berikut:*

***Pertama**, menurut alam pemikiran Pancasila, nilai-nilai ketuhanan (religiositas) sebagai sumber etika dan spiritualitas (yang bersifat vertikal-transendental) dianggap penting sebagai fundamen etika-spiritualitas kehidupan bernegara. Dalam kaitan ini, Indonesia bukanlah negara sekuler yang ekstrem, yang memisahkan "agama" dan "negara" serta berpretensi menyudutkan peran agama ke ruang privat/komunitas. Negara menurut alam Pancasila diharapkan dapat melindungi dan mengembangkan kehidupan beragama; sementara agama diharapkan bisa memainkan peran publik yang berkaitan dengan penguatan etika sosial. Pada saat bersamaan, Indonesia bukan "negara agama" yang hanya merepresentasikan salah satu (unsur) agama dan memungkinkan agama mendikte negara. Sebagai negara yang dihuni oleh penduduk dengan multiagama dan multikeyakinan, Indonesia diharapkan dapat mengambil jarak yang sama terhadap semua agama/keyakinan, melindungi semua agama/keyakinan, dan harus dapat*

*mengembangkan politiknya sendiri secara independen dari dikte-dikte agama.*

***Kedua**, menurut alam pemikiran Pancasila, nilai-nilai kemanusiaan universal yang bersumber dari hukum Tuhan, hukum alam, dan sifat-sifat sosial manusia (yang bersifat horizontal) dianggap penting sebagai fundamen etika-politik kehidupan bernegara dalam pergaulan dunia. Prinsip kebangsaan yang luas, yang mengarah pada persaudaraan dunia, dikembangkan melalui jalan eksternalisasi dan internalisasi. Keluar, bangsa Indonesia menggunakan segenap daya dan khazanah yang dimiliki untuk secara bebas-aktif "ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial." Ke dalam, bangsa Indonesia mengakui dan memuliakan hak-hak asasi manusia (hak sipil dan politik serta hak ekonomi, sosial dan budaya). Landasan etik sebagai prasyarat persaudaraan universal ini adalah "adil" dan "beradab."*

***Ketiga**, menurut alam pemikiran Pancasila, aktualisasi nilai-nilai etis kemanusiaan terlebih dahulu harus mengakar kuat dalam lingkungan pergaulan kebangsaan yang lebih dekat sebelum menjangkau pergaulan dunia yang lebih jauh. Dalam internalisasi nilai-nilai persaudaraan kemanusiaan ini, Indonesia adalah negara persatuan kebangsaan yang mengatasi paham golongan dan perseorangan. Persatuan dari kebhinekaan masyarakat Indonesia dikelola*



berdasarkan konsepsi kebangsaan yang mengekspresikan persatuan dalam keragaman, dan keragaman dalam persatuan, yang dalam slogan negara dinyatakan dengan ungkapan "bhinneka tunggal ika." Di satu sisi, ada wawasan persatuan-kesatuan yang berusaha mencari titik-temu dari segala kebhinekaan yang terkristalisasi dalam dasar negara (Pancasila), Undang-Undang Dasar dan segala turunan perundang-undangannya, negara persatuan, bahasa persatuan, dan simbol-simbol kenegaraan lainnya. Di sisi lain, ada wawasan kemajemukan yang menerima dan memberi ruang hidup bagi aneka perbedaan, seperti aneka agama/keyakinan, budaya dan bahasa daerah, dan unit-unit politik tertentu sebagai warisan tradisi budaya.

**Keempat**, menurut alam pemikiran Pancasila, nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, dan nilai serta cita-cita kebangsaan itu dalam aktualisasinya harus menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam semangat permusyawaratan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam visi demokrasi permusyawaratan, demokrasi memperoleh kesejatiannya dalam penguatan daulat rakyat, ketika kebebasan politik berkelindan dengan kesetaraan ekonomi, yang menghidupkan semangat persaudaraan dalam kerangka "musyawarah-mufakat." Dalam prinsip musyawarah-mufakat, keputusan tidak didikte oleh golongan mayoritas (mayorokrasi) atau kekuatan minoritas elit politik dan pengusaha (minorokrasi), melainkan dipimpin oleh hikmat/

kebijaksanaan yang memuliakan daya-daya rasionalitas deliberatif dan kearifan setiap warga tanpa pandang bulu.

**Kelima**, menurut alam pemikiran Pancasila, nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai dan cita kebangsaan, serta demokrasi permusyawaratan memperoleh kepenuhan artinya sejauh dapat mewujudkan keadilan sosial. Di satu sisi, perwujudan keadilan sosial harus mencerminkan imperatif etis keempat sila lainnya. Di sisi lain, otentisitas pengalaman sila-sila Pancasila bisa ditakar dari perwujudan keadilan sosial dalam perikehidupan kebangsaan. Dalam visi keadilan sosial menurut Pancasila, yang dikehendaki adalah keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan jasmani dan rohani, keseimbangan antara peran manusia sebagai makhluk individu—yang terlembaga dalam pasar—dan peran manusia sebagai makhluk sosial—yang terlembaga dalam negara—juga keseimbangan antara pemenuhan hak sipil dan politik dengan hak ekonomi, sosial, dan budaya. Dalam suasana kehidupan sosial-perekonomian yang ditandai oleh aneka kesenjangan sosial, kompetisi ekonomi diletakkan dalam kompetisi yang kooperatif (coopetition) berlandaskan asas kekeluargaan; cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara; bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.



*Dalam mewujudkan keadilan sosial, masing-masing pelaku ekonomi diberi peran masing-masing yang secara keseluruhan mengembangkan semangat ke-keluargaan. Peran individu (pasar) diberdayakan, dengan tetap me-nempatkan negara dalam posisi penting dalam menguasai "kekayaan bersama" (commonwealth) serta sebagai penyedia kerangka hukum dan regulasi, fasilitas, rekayasa sosial, serta jaminan sosial."*

(Yudi Latif, 2017)

### **Generasi Muda sebagai Inteligensia dalam Tantangan Terkini**

Pada bagian pendahuluan, dijabarkan bagaimana lapangan kebangsaan mengalami tantangan sebagaimana bangsa-bangsa lain di dunia, misalnya "*post-truth*" (dimana opini dan persuasi jauh lebih canggih dan penting daripada fakta), ketidakseimbangan global (termasuk akumulasi kekuatan pada aktor-aktor tertentu saja), otomatisasi (mengenai ketenagakerjaan dan jasa atas pilar ragam rupa mesin dan komputasi), migrasi (termasuk migrasi tenaga kerja rendah dan pengungsi), potensi kegagalan negara yang membesar (termasuk luntarnya relevansi batas-batas geografis negara), munculnya kripto-ekonomi, kerentanan keuangan global, dan munculnya aktor-aktor yang tidak mudah didefinisikan. Dalam situasi sedemikian, generasi muda bisa jadi kehilangan "kemudaan" mereka dalam arti bahwa semangat penemuan, penjelajahan, kemauan untuk terlibat dalam masalah-masalah kebangsaan semakin pudar. Namun, hal ini juga membutuhkan pemahaman dan pendalaman oleh penggiat kebangsaan,

kalangan pendidikan, dan periset untuk dapat secara cermat melihat ruang-ruang yang memang imperatif untuk dikembangkan untuk generasi muda.

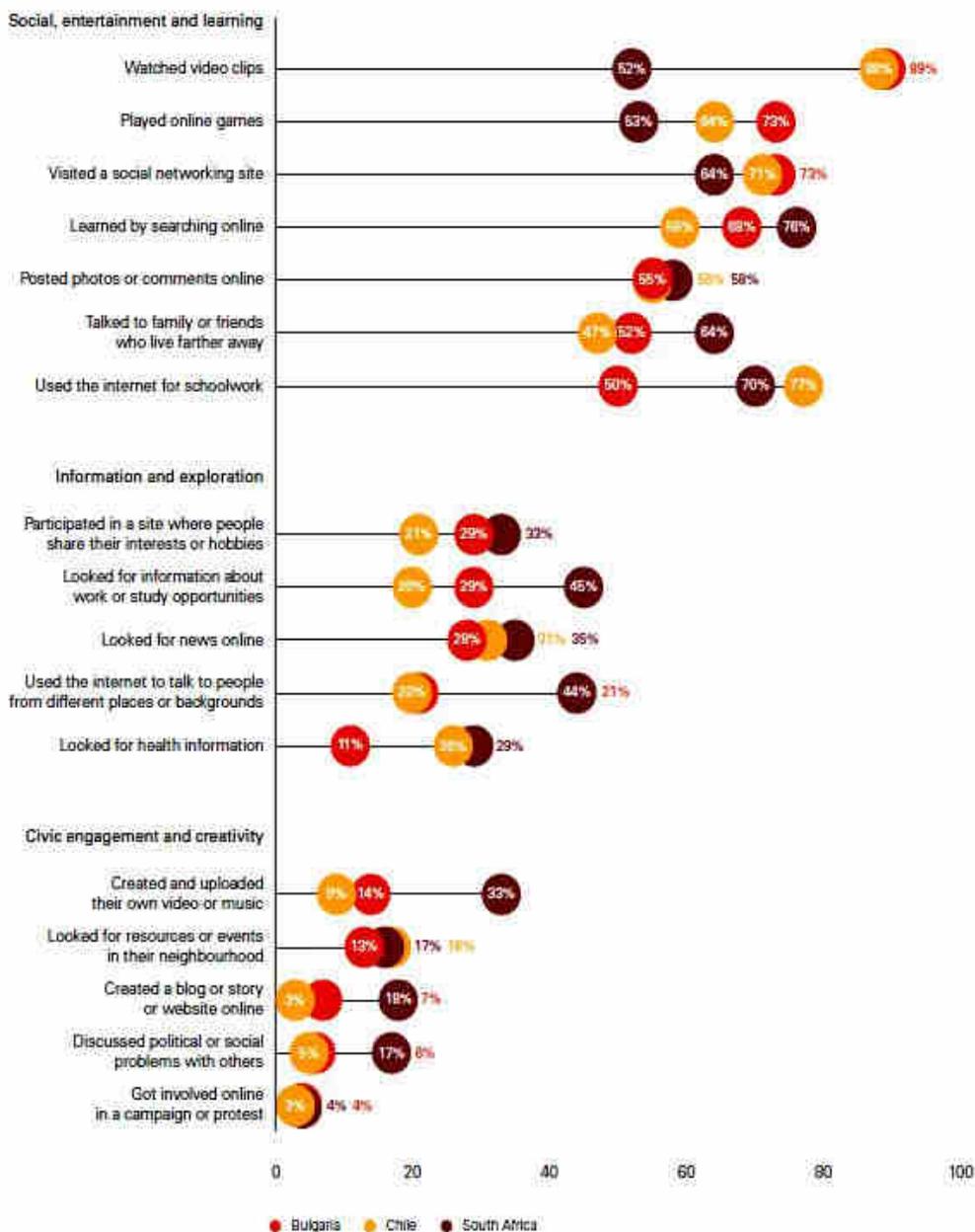
Sebelum sampai di sana, penulis ambil dua figur yang dapat membantu kita untuk secara kreatif membaca situasi "kemudaan" generasi muda kita.

Gambar 1 adalah mengenai aktivitas online dari kelompok umur 9-17, usia penting dalam pembentukan diri. Dalam gambar ini, diambil contoh Bulgaria, Chile, dan Afrika Selatan. Gambar ini diambil sebagai alat bantu untuk mulai melihat kelompok umur yang sama dalam bangsa kita. Penulis yakin sudah banyak yang melakukan riset mengenai generasi muda dan apa yang mereka pikirkan, lakukan dan kembangkan. Penulis ambil laporan UNICEF karena relevan sebagai pembanding terhadap riset-riset yang sudah beredar (atau yang dikembangkan secara tertutup).

***"Generasi muda bisa jadi kehilangan "kemudaan" mereka dalam arti bahwa semangat penemuan, penjelajahan, kemauan untuk terlibat dalam masalah-masalah kebangsaan semakin pudar."***

Gambar 1: Aktivitas online umur 9-17 tahun (dengan perbandingan dari negara Bulgaria, Chili, dan Afrika Selatan)  
-Laporan UNICEF , State of Children 2017

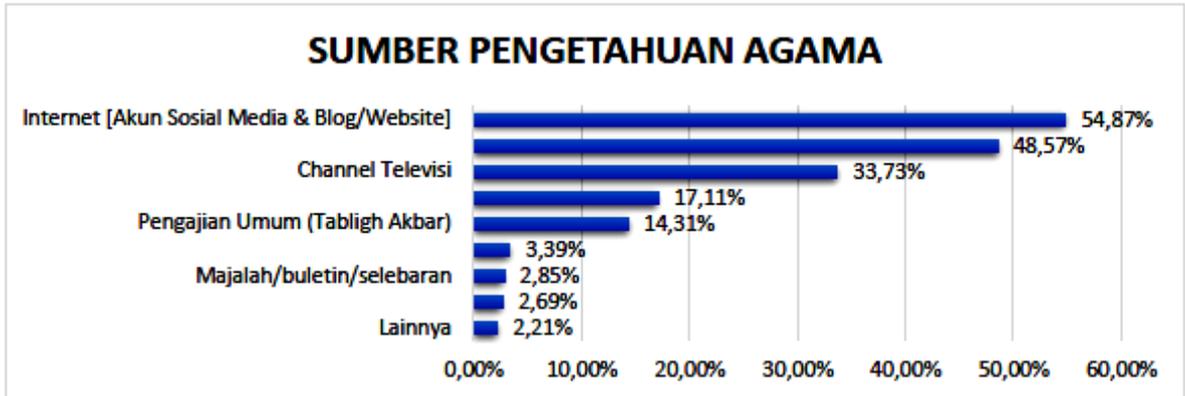
**FIGURE 2.7 WHAT ARE CHILDREN DOING ONLINE?**  
PERCENTAGE OF CHILDREN AGED 9-17 REPORTING INVOLVEMENT IN ONLINE ACTIVITIES, 2016-2017



Source: Global Kids Online partner countries 2016-2017, aggregated by UNICEF Office of Research – Innocenti.



Gambar 2: Bagaimana siswa/mahasiswa dan guru/dosen mencari pengetahuan agama mereka



Gambar 2 adalah bagaimana generasi muda mencari dan menggali sumber pengetahuan agama mereka dalam sekolah dan perguruan tinggi. Gambar ini adalah bagian dari riset PPIM (Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat) Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

Dalam gambar di atas, kita dapat setidaknya ada banyak “pintu masuk” yang perlu digunakan untuk mengembangkan peran dan inisiatif dari generasi muda dalam tantangan yang ada di atas. Generasi muda menggunakan banyak pintu untuk mengembangkan inisiatif mereka dan penerimaan diri mereka di dunia yang lebih luas. Cara mereka memahami Indonesia turut dibentuk oleh Pencarian itu. Pintu-pintu itu tetap terbuka bagi pengembangan aktualisasi Pancasila.

Sejenak, kita lihat pintu-pintu tersebut, dengan tetap mempertimbangkan tantangan di atas :

a. Pintu untuk titik temu

Pancasila perlu diidentifikasi sebagai titik temu, bukan sebagai ‘alat paksa’. Supaya diidentifikasi

demikian, kegiatan “fisik” amat penting dalam mengembangkan identifikasi tersebut. Kegiatan ini dapat berupa kegiatan berbasis komunitas, berbasis tanggap bencana atau tanggap krisis, berbasis ekonomi kecil. Kegiatan ini perlu untuk dieksplorasi dalam bentuk, skala, dan cara pengembangan. Banyaknya desa wisata, desa Pancasila, kampung Pancasila menjadi contoh penting dalam hal ini. Dalam jenis-jenis itu, kita menemukan interaksi yang sehat, yang dapat diuji tiap hari (bukan hanya dalam siklus tertentu). Menurut para penggiatnya, jenis ini malah tidak mudah untuk diwujudkan. Ada perihal penerimaan satu dengan yang lain yang harus dihadapkan pada situasi di luar komunitas mereka. Ada perihal ekonomi. Hal-hal ini akan menguji pengalaman tersebut.

Pada akhirnya, generasi muda akan selalu mengevaluasi diri mereka dalam pertemuan itu. Sekali lagi, dalam tantangan di atas, ketokohan dari generasi “old” bisa relevan,

bisa juga tidak relevan. Mereka perlu dibantu dalam proses itu untuk tetap bersikap positif, sebagaimana segmen umur lain yang juga mengembangkan sikap positif dalam hidup mereka. Pancasila tidak akan abstrak jika ada pengalaman yang kuat dan terus-menerus.

b. Pintu 2 : ke ruang yang baru

Mencari ruang-ruang baru sudah menjadi ciri dari “kemudaan” generasi muda. Ruang-ruang ini perlu diidentifikasi sebagai aktualisasi Pancasila. Disebut ruang baru karena ruang ini belum (saat itu) dimasuki oleh generasi muda terkait.

Ada suatu pengalaman yang relevan untuk disampaikan dimana suatu kelompok generasi muda diajak untuk mengunjungi tempat ibadah dari kelompok agama yang berbeda-beda satu dengan yang lain. Pengalaman ini menggugah bukan hanya penerimaan terhadap sesama anak bangsa, melainkan juga sikap sujud syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas anugerah Indonesia. Pengalaman ini amat nyata dan amat kuat membentuk generasi muda.

Pengalaman yang lain yang juga relevan adalah keterlibatan kelompok generasi muda dalam proses tanggap bencana. Gempa bumi tahun 2006 dan letusan Gunung Merapi tahun 2010, keduanya di Yogyakarta. Keterlibatan ini menumbuhkan bukan hanya bela rasa antar komunitas, melainkan juga inisiatif-inisiatif pasca bencana yang puluhan banyaknya.

c. Pintu 3: platform belajar yang beragam (yang penting untuk aktualisasi Pancasila)

Usia belajar seringkali diwarnai oleh satu jenis platform belajar tertentu. Seringkali pranata pendidikan formal tidak menyediakan platform lain. Generasi muda pasti akan mencari platform lain. Dalam pencarian ini, generasi muda ini akan puas dengan apa yang mereka cari namun tidak selalu bersifat membangun terhadap aktualisasi Pancasila.

Platform dimengerti sebagai alat, tata, dan capaian. Dalam hal ini, platform yang beragam dapat selalu mencari pengalaman dari tokoh, penggiat, contoh praktek di luar teks tertulis. Pengalaman akan memberikan insentif bagi generasi muda untuk mau mengembangkan peran mereka sendiri.

## PENUTUP

### Tantangan Aktualisasi Pancasila

Peran “*inteligensia*” Indonesia menguatkan kembali pandangan dan analisis bahwa “kemudaan” dibentuk baik oleh tantangan maupun kemampuan mereka untuk keluar dari komunitas dan/atau pengalaman “hari ini”. Mereka melihat masa depan dimana penghargaan terhadap martabat manusia sebagai capaian. Kemampuan untuk mengolah “kemudaan” ini juga mengembangkan kemampuan untuk bertukar pikiran, berurusan dengan dilema-dilema, dan terus mengembangkan ruang-ruang kebangsaan. Edward Shils merumuskan hal ini sebagai “penyeru”, “pemimpin”, “pelaksana”.

Dalam “Misi Iwakura”, sekelompok orang pergi ke berbagai bangsa untuk belajar, dan kemudian mengolahnya untuk tanah air, yaitu Jepang, yang kemudian menjadi Restorasi Meiji.



Misi ini tipikal intelligensia dalam transformasi Jepang. Gerakan 4 Mei di Cina yang dimotori intelligensia kemudian melahirkan sebuah “republik” di atas imperium yang sudah berumur berabad-abad. Intelligensia berada pada posisi yang sama dengan generasi mereka di berbagai belahan dunia. Hal ini juga menjadi sebuah ruang yang penting dalam membandingkan peran intelligensia dalam menjawab tantangan zaman.

Pada akhirnya, aktualisasi Pancasila adalah tantangan sebagaimana yang ditanggapi oleh generasi muda yang sedang mengembangkan mereka sebagai atau serupa intelligensia. Pengalaman bersama antar komunitas epistemik, bertemu dengan ruang dan pengalaman baru, sertai kemampuan me-muda-kan kembali institusi formal adalah upaya mereka dalam aktualisasi Pancasila sebagaimana yang generasi muda itu “seru”kan.

Madjid, Nurcholish, 2004, Indonesia Kita, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, Universitas Paramadina, Perkumpulan Membangun Kembali Indonesia

Mannheim, Karl, 1936, Ideology and Utopia, London: Routledge

Mckinsey, 2016, Unlocking Indonesia’s Digital Opportunity, Mckinsey and Company

PPIM, 2017, Survei Nasional tentang Sikap Keberagamaan di Sekolah dan Universitas di Indonesia, Jakarta: PPIM (Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat), Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah

Shils, Edward, 1972, The Intellectuals and the Powers and Other Essays, London: the University of Chicago Press

UNICEF, 2017, The State of the World’s Children 2017, UNICEF (United Nations Children’s Fund)

---

## DAFTAR PUSTAKA

Latif, Yudi, 2003, Intelligensia Muslim dan Kuasa: Genealogi Intelligensia Muslim Indonesia Abad ke-20, Jakarta: Mizan Pustaka

\_\_\_\_\_, 2011, Negara Paripurna, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

\_\_\_\_\_, 2014, Mata Air Keteladanan: Pancasila dalam Perbuatan, Jakarta: Mizan Pustaka

\_\_\_\_\_, 2017, Pancasila: Idealitas dan Realitas, (Pidato Pengukuhan) Jakarta: Asosiasi Ilmu Pengetahuan Indonesia

---

1. Kepala Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP), anggota Asosiasi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI)

2. Dalam khasanah sejarah, selalu perlu untuk melihat bahwa Restorasi Meiji bukan pertamanya sebagai gerakan kejut (discontinuity) melainkan transformasi dari ekosistem yang lama ke yang baru. Dalam transformasi ini, “penyelidikan”, “pembelajaran secara seksama”, “perbandingan” menjadi upaya penting sebagaimana diwujudkan dalam “Iwakura Mission”, sebuah misi kajian oleh negarawan Jepang ke negara-negara lain dalam kurun



1871-1873. Bidang-bidang Kajian ini meliputi industri, pertanian, pertambangan, keuangan, kebudayaan, pendidikan, militer dan kepolisian.

3. Sebagaimana dirumuskan oleh Abdul Rivai, dalam edisi perdana “Bintang Hindia” pada tahun 1902.